



STRATEGI MEDIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DI DISKOMINFOTIKSAN KOTA LUBUKLINGGAU

Dela Silvia¹, Ronal Aprianto², Irma idayati³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau
e-mail: ¹delasilvia317@gmail.com, ²ronal_aprianto@univbinainsan.ac.id,
³irmaidayati@univbinainsan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi media yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Di era digital, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk mengelola komunikasi publik secara efektif. Strategi yang digunakan meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi media digital, seperti situs web resmi, media sosial (Instagram, YouTube, dan Facebook), serta layanan aduan masyarakat berbasis teknologi (SP4N-LAPOR!). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi media Diskominfo berhasil meningkatkan aksesibilitas informasi publik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan literasi digital masyarakat. Evaluasi berkala yang dilakukan menunjukkan bahwa media digital menjadi platform yang efektif dalam meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk penguatan strategi media Diskominfo dalam menjawab tantangan era digital dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Kata kunci ; Strategi media, pelayanan informasi, media digital.

Abstract

This research aims to analyze the media strategy implemented by the Lubuklinggau City Communication, Informatics, Statistics and Encryption Service (Diskominfo) in improving information services to the public. In the digital era, developments in information technology require the government to manage public communications effectively. The strategies used include planning, implementation and evaluation of digital media, such as official websites, social media (Instagram, YouTube and Facebook), as well as technology-based public complaint services (SP4N-LAPOR!). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that Diskominfo's media strategy has succeeded in increasing the accessibility of public information, even though there are still obstacles such as limited human resources, technological infrastructure and public digital literacy. Periodic evaluations carried out show that digital media is an effective platform in increasing government interaction with the community. This research provides a practical contribution in the form of recommendations for strengthening Diskominfo's media strategy in responding to the challenges of the digital era and meeting society's information needs.

Keywords : Media Strategy, Information Services, Digital Media

1. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan

informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan pelayanan publik. Untuk merespons hal



tersebut, pengelolaan SDM di Diskominfo perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi, agar dapat meningkatkan pelayanan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Di Kota Lubuklinggau, peran Diskominfo sebagai penyedia informasi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah dan meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi media yang diterapkan oleh Diskominfo menjadi salah satu instrumen kunci dalam memperbaiki kualitas layanan. Penggunaan berbagai platform media, baik media sosial maupun situs resmi, memerlukan SDM yang kompeten dalam merancang, mengelola, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif (Komedi & Ferianto, 2023).

Teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin meningkat. Dalam situasi ini, media berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi publik, Diskominfo Kota Lubuklinggau harus menyusun strategi media yang efektif untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih transparan dan tanggung terhadap kebutuhan informasi masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu Diskominfo perlu beradaptasi dan memanfaatkan berbagai platform media untuk menjangkau masyarakat lebih luas (Cheng & Chen, 2020).

Pelayanan informasi adalah bagian integral dari komunikasi pemasaran modern, baik di sektor publik maupun swasta. Menurut mereka, pelayanan informasi harus dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara proaktif dan relevan, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk digital, agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas (Nababan, 2020).

Strategi media adalah pendekatan terencana dalam memilih saluran

komunikasi digital yang sesuai untuk menyampaikan pesan, berinteraksi dengan audiens, serta membangun hubungan yang berkelanjutan. Mereka juga menyoroti pentingnya penggunaan data dan analitik dalam rancangan strategi media yang efektif (Maria Nila Anggia dkk, 2019).

Penelitian yang menunjukkan bahwa evaluasi berkelanjutan membantu lembaga memahami efektivitas komunikasi mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi Diskominfo untuk mengevaluasi secara berkala strategi media yang digunakan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan aspek penting dalam layanan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah dapat meningkatkan kualitas keputusan yang di ambil (Maharani., 2023).

Diskominfo berperan sebagai promotor utama penyebaran informasi relevan melalui berbagai platform tradisional dan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat. Di era transformasi digital, layanan informasi tidak lagi terbatas pada penggunaan media cetak dan penyiaran tradisional. Penggunaan media digital seperti situs resmi pemerintah, aplikasi layanan publik, dan media sosial menjadi semakin penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan lebih cepat dan efisien (Cahyani, 2020).

Media baik digital maupun tradisional, telah menjadi alat utama dalam komunikasi publik. Di satu sisi media digital seperti website resmi pemerintah, media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), serta aplikasi pelayanan publik berbasis internet telah mendominasi penyampaian informasi di kalangan masyarakat perkotaan yang semakin melek teknologi. Penggunaan media digital mampu menyebarluaskan informasi secara cepat, mencapai audiens yang luas, dan memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, media tradisional seperti radio, televisi, dan surat kabar masih memainkan peran penting, terutama di kalangan masyarakat yang belum



sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi digital, seperti penduduk di pedesaan atau kelompok usia lanjut (Kussanti, 2021).

Hal ini juga di dukung oleh penelitian internasional yang di lakukan yang menemukan bahwa media sosial dapat membantu pemerintah menyebarkan informasi dengan cepat dan interaktif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi Diskominfo untuk mengembangkan strategi layanan informasi yang cukup fleksibel dalam merespons perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Strategi tersebut harus mencakup pemanfaatan media digital yang terintegrasi dan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memahami dan menggunakan informasi yang di berikan secara optimal (Ibnu Hakim., 2022).

Informasi yang disebarkan melalui media internet atau media sosial diharapkan dapat memberikan informasi yang benar, berkualitas, dan memuaskan bagi masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami fungsi dari program yang di jalani oleh ASN. Selain itu, terdapat kasus dimana akun media sosial Diskominfo mengunggah informasi terkait pasangan calon (Paslon) dalam pemilu, padahal aturan yang berlaku melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memihak atau mengunggah dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Tindakan ini tidak hanya melanggar etik profesi ASN, tetapi juga bertentangan dengan regulasi yang terlibat dalam kampanye

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme atau interpretative yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam, dimana peneliti sebagai instrument utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang diperoleh biasanya data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif

atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif berupa pemahaman makna, pemahaman keunikan, konstruksi fenomena, dan penemuan hipotesis (sugiono, 2020).

Penelitian sebagai upaya memperoleh kebenaran, harus didasar pada proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti akan memaparkan, menggambarkan, dan menganalisa secara kritis dan objektif dalam pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini digunakan sesuai dengan tujuan untuk menganalisis tentang Strategi Media Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat di Diskominfo Kota Lubuklinggau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2014 Kominfo atau sekarang lebih dikenal dengan Diskominfo masih merupakan bidang yang tergabung dengan Dinas Perhubungan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terbentuk. Pada tahun 2016 Diskominfo mulai berdiri sendiri sebagai Dinas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Maka terbentuklah DISKOMINFOTIKSAN.

Kemudian 5 tahun atau tepatnya pada tahun 2021 Diskominfo berubah nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah pada bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian

Dalam hal ini komunikator berarti Diskominfo Kota Lubuklinggau sedangkan komunikannya adalah masyarakat yang mengakses media sosial yang dikelola. Dalam membangun komunikasi dan umpan balik dengan masyarakat di era digital, Diskominfo Kota Lubuklinggau memanfaatkan fitur komentar pada media



sosial untuk menyerap dan mengolah aspirasi dari mereka. Begitu juga masyarakat dalam memanfaatkan media sosial memiliki kebebasan untuk berpendapat, memberikan kritik, saran pengaduan dan semacamnya sebagai bentuk partisipasi.

Setelah merumuskan dan melaksanakan, Tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Lubuklinggau setelah berita ditayangkan dan dibahas melalui rapat setiap minggu untuk mengevaluasi sejauh mana informasi tersebut sampai di masyarakat. Evaluasi juga dilakukan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai 14 Transkrip Wawancara 02/W/2-II/202375 suatu program termasuk pengelolaan maupun hasil atau dampak pelaksanaannya. Sebagai media pemerintahan, Diskominfo Kota Lubuklinggau dituntut harus aware terhadap semua berita yang telah ditayangkan untuk dijadikan sebagai acuan berita yang akan diproduksi selanjutnya. Beberapa poin-poin juga menjadi bahan pertimbangan terkait dengan evaluasi yang dilakukan, diantaranya yaitu dari pihak internal pegawai Diskominfo sendiri dan juga dari pihak eksternal.

Strategi media digital merupakan salah satu upaya utama yang diterapkan Diskominfo Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada tuntutan era digital yang membutuhkan penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan interaktif guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Di era digital, pola konsumsi informasi masyarakat telah bergeser, di mana media digital menjadi pilihan utama karena fleksibilitas dan kecepatannya. Oleh karena itu, Diskominfo mengadopsi berbagai platform media digital untuk menjawab tantangan tersebut.

Lembaga pemerintahan mempunyai peran penting dalam membuka ruang untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan momentum bagi

lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi.

Menetapkan strategi yang tepat merupakan jalan agar suatu program dari lembaga pemerintah itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini yang juga dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Beberapa hal mengenai strategi juga mereka lakukan untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi berdasarkan teori Fred. R David dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategis Konsep mengungkapkan konsep strategi yang terbagi dalam tiga tahapan yakni perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Setelah diketahui bahan berita, saatnya wartawan membagi tugas peliputan berita. Masing-masing wartawan akan mendapatkan jobdesc berbeda. Hal ini berkaitan juga dengan bentuk berita yang akan ditayangkan, mengingat informasi yang disampaikan oleh Diskominfo Kota Lubuklinggau dalam satu bahan berita akan ditayangkan dalam bentuk yang berbeda-beda seperti hard news, video, live report, live streaming, infografis dll. Sehingga dalam proses peliputan berita ada yang bertindak sebagai wartawan, kameramen, dan reporter.

Berdasarkan data dari narasumber dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan tahap perencanaan Diskominfo Kota Lubuklinggau sudah dilakukan dengan baik. Terdapat koordinasi yang baik antara tim dalam penayangan berita sehingga pelayanan



informasi kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

hasil penelitian (Nababan, 2020) yang meneliti strategi pelayanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, yang menunjukkan bahwa PPID sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang KIP, dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan informasi tersebut. Temuan ini bisa dibandingkan dengan hasil penelitian Anda tentang Dinas Kominfo di daerah lain dan bagaimana strategi yang diterapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik

Menurut Murniati yang dikutip Ulfah Irani Z memaparkan implementasi strategi sebagai tahapan aksi dari manajemen strategic sebagai upaya mewujudkan program yang telah ditetapkan pada tahapan perencanaan strategi. Setelah berita dibuat oleh wartawan dan sudah melalui tahap pengecekan, berita tersebut akan dimuat di media online sesuai bentuk berita yang sudah ditentukan sebelumnya.

Informasi yang ditayangkan di website Lubuklinggaukota.go.id berbentuk hard news. Sementara di YouTube Pemerintah Kota Lubuklinggau berbentuk video live report, kegiatan Walikota dan Wakil, dan juga siaran langsung pada hari-hari besar di Kota Lubuklinggau. Berita yang ditayangkan di Facebook Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instagram Lubuklinggau berbentuk gambar dan video serta penjelasan berita yang termuat di caption.

Selain itu, Diskominfo Kota Lubuklinggau juga mengelola layanan aduan masyarakat berbasis aplikasi WhatsApp Suara Lubuklinggau dan layanan aduan berbasis website SP4N-LAPOR. Layanan aduan ini dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh lembaga pemerintah. Dalam teknisnya, jika laporan sudah masuk pihak Diskominfo akan menjadi jembatan penghubung untuk mendistribusikannya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

permasalahan untuk ditindaklanjuti sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi terkait keluhannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi media Diskominfo Kota Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kurangnya pelatihan yang dilakukan secara rutin menyebabkan staf Diskominfo kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang cepat. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi secara efektif.
2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat: Literasi digital masyarakat di Kota Lubuklinggau masih rendah, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh pemerintah melalui media digital. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan sebagian masyarakat, yang masih lebih terbiasa dengan saluran informasi tradisional.
3. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Masalah infrastruktur, khususnya kualitas jaringan internet yang tidak merata, juga menjadi hambatan besar dalam mengakses informasi secara digital. Wilayah dengan kualitas jaringan yang buruk menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan secara online.
4. Akses Terbatas pada Masyarakat: Tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau perangkat teknologi untuk mengakses informasi secara digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif



dengan menggunakan berbagai saluran informasi seperti media sosial, surat kabar, dan sosialisasi langsung untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi melalui media digital.

5. Penyebaran Hoaks: Penyebaran informasi palsu atau hoaks yang cepat melalui media sosial menjadi salah satu tantangan utama. Masyarakat sering kesulitan membedakan informasi resmi dari pemerintah dengan informasi palsu. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh Diskominfo.

V. SARAN

Setelah melakukan penelitian tersebut, peneliti dapat member saran yang dapat berguna bagi Dinas Diskominfo Kota Lubuklinggau, Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Penguatan Regulasi dan Etika Komunikasi: Memastikan setiap informasi yang disampaikan mematuhi regulasi dan etika komunikasi, terutama pada isu-isu sensitif seperti pemilu.
2. Pengembangan Kompetensi SDM: Diskominfo perlu meningkatkan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan rutin terkait pengelolaan media digital dan strategi komunikasi publik. Pelatihan dapat difokuskan pada penggunaan alat analitik media sosial untuk memantau efektivitas strategi komunikasi.
3. Optimalisasi Media Digital: Memperkuat pengelolaan media digital seperti website dan media sosial agar lebih interaktif dan informatif, termasuk pembaruan konten secara berkala. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk personalisasi konten agar lebih relevan bagi masyarakat.
4. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi strategi media secara rutin untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Evaluasi melibatkan indikator kepuasan masyarakat, tingkat partisipasi, dan aksesibilitas informasi.
5. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat: Mengadakan program literasi digital untuk masyarakat guna meningkatkan

pemahaman mereka terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital.

6. Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, seperti kecepatan internet dan perangkat teknologi, guna mendukung pelayanan informasi yang lebih baik.
7. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Stakeholder. Menggandeng komunitas lokal dan pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi secara lebih luas dan cepat. Membentuk forum diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung mengenai kebutuhan informasi.
8. Diversifikasi Saluran Media: Selain media digital, tetap memanfaatkan media tradisional seperti radio dan televisi untuk menjangkau masyarakat yang belum terakses teknologi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, Y., & Chen, Z. F. (2020). The Influence of Presumed Fake News Influence: Examining Public Support for Corporate Corrective Response, Media Literacy Interventions, and Governmental Regulation. *Mass Communication and Society*, 23(5), 705–729.
<https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1750656>
- Haikal Ibnu Hakim, Ohorella, N., & Edy Prihantoro. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Angkringan Khulo Melalui Media Sosial Instagram. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 111–122.
<https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.802>
- Komedi, K., & Ferianto, J. (2023). Konsep Dan Terapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia (Eksistensi Kelembagaan BPSDM). *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 479–487.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5317>
- Kussanti, D. P. (2021). Strategi Media Komunikasi Badan Informasi Geospasial Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 120–127.



-
- <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.3182>
Maria Nila Anggia, & Muhammad Rifki Shihab. (2019). Strategi Media Sosial Untuk Pengembangan Umkm. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 2(2), 159–170.
<https://doi.org/10.21460/jutei.2018.22.125>
- Masrifah Cahyani, A. (2020). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam Melayani dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1–16.
<https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.1-16>
- Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166.
<https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3694>
- Regina Maharani, Yulia Citra Rahayu, Devi Karina Seviani, & Muhammad Yudia Noor Akbari. (2023). Strategi Diseminasi Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Di Kabupaten Ciamis. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 342–353.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.614>